

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022)



Skripsi Oleh :

MELITA UTAMI

01031182025017

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL
Tahun 2018-2022

Disusun oleh:

Nama : Melita Utami
NIM : 01031182025017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 01 Maret 2024



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196409031994032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022)

Disusun Oleh:

Nama : Melita Utami
NIM : 01031182025017
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Jum'at, 05 April 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 25 April 2024

Pembimbing,

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196409031994032001

Penguji,

Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197802102001122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,

ASLI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

02/2024
4/05
Kawu

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melita Utami
NIM : 01031182025017
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022)

Pembimbing : Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 05 April 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 25 April 2024

Pembuat Pernyataan,



Melita Utami
NIM.01031182025017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (suatu urusan yang lain), dan hanya kepada tuhanlah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah :6-7)

“Allah tidak akan membebani seorang hambanya diluar batas kemampuannya, melainkan sesuai dengan batas kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Teruslah melangkah, lakukan semampu dan sebisamu, jangan pernah merasa lelah karena mustahil tuhan membawa langkah sejauh ini hanya untuk gagal”

“Berdoalah! desak allah sesukamu, jika doa itu tersulam dari bahan yang tulus janganakan sepotong hati manusia konon surgapun bisa ditukar”

Skripsi ini kupersembahkan

Untuk:

- **ALLAH SWT**
- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Adikku yang kubanggakan**
- **Keluarga besarku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**
- **Diriku Sendiri**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan berkat dan rahmat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar lebih baik sehingga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak serta bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan yang membacanya.

Indralaya, 25 April 2024
Penulis,



Melita Utami
NIM. 01031182025017

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis secara khusus berkeinginan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada :

1. Allah SWT atas semua pertolongan, kemudahan, rahmat kesehatan kepadaku dan seluruh tim penelitian kami.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa., S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr.E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abukosim, S.E., M.M., AK., CA selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing dan memberikan banyak arahan selama perkuliahan.
7. Ibu Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak CA selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah sangat membantu untuk memberikan arahan, bimbingan, ilmu yang baru serta doa untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa, kesabaran yang sangat besar ketika penulis harus memotong dan mengganggu waktu kerja Ibu

untuk ditemui dalam proses bimbingan, serta berbagai motivasi, kritik dan saran.

8. Ibu Dr. Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji seminar proposal dan komprehensif yang telah memberikan kritik, saran serta motivasi yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini.

9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya terutama dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.

10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.

11. Kedua orang tuaku yaitu Bapak Samsuri dan Mak Mitasari. Terima kasih atas segala pengorbanan Bapak dan Emak. Terima kasih banyak sudah bekerja dan mencari nafkah untuk kedua anaknya. Terima kasih karena telah membiayai perkuliahan penulis selama ini hingga akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan untuk meraih gelar sarjana. Terima kasih atas semua perjuangan, tetes keringat serta banyaknya pengorbanan yang telah dilakukan demi penulis serta kekuatan untuk terus bertahan demi kedua anakmu ini. Terima kasih atas jawaban “Ya” untuk semua permintaan yang dilontarkan penulis tanpa pernah ada kata tolakan. Terima kasih atas semua doa, dukungan, nasihat, serta kasih sayang yang selalu diberikan serta tolong bertahan, kuat dan hidup lebih lama lagi demi keberhasilan penulis. Mungkin ucapan terima kasih ini tidak pernah cukup untuk membalas semua jasa bapak dan mak tapi percayalah penulis akan terus mengusahakan yang terbaik.

12. Adikku yang selalu aku banggakan, Arga Lefran. Terima kasih telah hadir dan ikut dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maaf jika terkadang harus mengalah demi

keinginan dan ego penulis. Teruslah bertumbuh menjadi lebih hebat dan tuntaskan semua kewajiban hingga semua mimpi dan cita-citamu tercapai. Semangat dan teruslah berusaha untuk membanggakan kedua orang tua.

13. Mak wo, Bak wo, Bik adek, Bik Tari, Bik Yayuk dan Bik Bel. Terima kasih karena telah memberikan dukungan penuh kepada penulis hingga penulis bisa mencapai titik ini. Tolong jangan berhenti untuk mendukung penulis hingga dikemudian hari.

14. Grup Wanita Sholehah (Aulia, Dina, Reza, Okta, Janita, dan Nasywa), terima kasih atas bantuan, dukungan dan doa kalian selama ini. Terima kasih karena sudah menyuguhkan berbagai obrolan di grup sehingga perkuliahan kita lebih berwarna. Terima kasih atas segala bantuan yang kalian berikan tanpa pernah ada rasa pamrih selama kita menjalani serangkaian proses perkuliahan. Terima kasih karena telah menjadi teman yang baik sejak awal perkuliahan hingga menuju akhir perkuliahan ini.

15. Grup Warga Layo (Mala, Dina, Fardzah, Ilham, dan Rivaldi), terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, doa serta perjuangan kalian untuk penulis. Penulis sangat bersyukur telah dipertemukan dan dipersatukan dengan kalian semua. Terima kasih karena sudah menjadi garda serta penopang bagi penulis utamanya ketika penulis mengalami problem selama penyusunan skripsi. Terima kasih atas energi positif yang kalian berikan serta dukungan bagi penulis untuk kembali berdiri tegak demi melanjutkan dan menyelesaikan proses perkuliahan.

16. Grup anak baik (Putra dan Okta), terima kasih karena kalian sudah menghibur selalu atas kerandoman yang selalu muncul di grup wa. Semoga kalian selalu dilimpahi kebahagiaan dan ayo terus berproses. Mari Kita selesaikan semua yang sudah kita mulai.

17. Oktavia Ayu Padmasari, terima kasih tak terhingga untuk sahabatku yang sangat aku sayangi. Teruntuk Oktavia (wak ku) sudah menjadi sahabat terbaik dan teman seperjuangan dari mulai selalu mengusahakan berada dikelas yang sama hingga satu konsentrasi skripsi penulis dari awal perkuliahan hingga menuju akhir perkuliahan ini. Terima kasih selalu mendukung penulis, rasa sayang tak terhingga untuk okta. Terima kasih sudah menjadi sandaran penulis selama perkuliahan dan selalu memberi energi positif.

18. Magang BSB (Nia dan Mala), terima kasih mala karena sudah mau direpotkan oleh penulis dan menyambut dengan hangat kedatangan penulis di kosan nya. Terima kasih atas semua keluh kesah yang selalu didengarkan, atas semua perjalanan yang kita lalui walaupun tidak diiringi dari awal semester, terima kasih dan terus bertahan mala. Terima kasih untuk nia karena sudah membantu untuk membimbing penulis sampai saat ini yang walaupun sudah lulus tetapi tetap Ikhlas membantu tanpa pamrih sedikit pun. Terima kasih kepada kalian semoga nanti kita masih dipertemukan tuhan kembali dengan kesuksesan masing-masing aamiin.

19. Kak Fedrico Adhikarya, terima kasih karena selalu memberikan informasi dan arahan kepada penulis terkait administrasi skripsi mulai dari alur pengajuan dosen pembimbing proposal skripsi, ujian seminar proposal, pengajuan dosen pembimbing skripsi hingga ujian komprehensif. Terima kasih juga karena sudah banyak memberikan penulis saran dan masukan kepada penulis terkait penyelesaian skripsi ini dan membantu sampai pada tahap persiapan ujian komprehensif.

20. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan yang indah selama penulis menempuh pendidikan di kampus tercinta.

21. Sahabat seperjuanganku semasa SMA (Via, Misba, Rohaya, Poppy), terima kasih karena telah kebersamai perjalanan penulis hingga dititik ini walaupun terkadang untuk bertemu saja harus mencari waktu yang luang. Terima kasih tetap mendukung penulis di tengah kesibukan masing-masing. Semoga kita tetap menjadi sahabat hingga tua, aamiin.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

23. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all there hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a give and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all the time.*

Indralaya, 25 April 2024
Penulis,



Melita Utami
NIM. 01031182025017

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswi :

Nama : Melita Utami

Nim : 01031182025017

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 25 April 2024

Dosen Pembimbing,



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196409031994032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP.197303171997031002

ABSTRAK

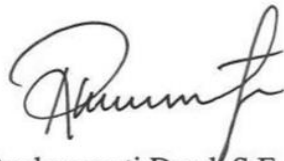
PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022)

Oleh:
Melita Utami

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, ukuran legislatif dan tipe pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah SUMBAGSEL (Sumatera Bagian Selatan) tahun 2018-2022. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di wilayah SUMBAGSEL tahun 2018-2022. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 27 kabupaten/kota. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat analisis SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan umur pemerintah daerah dan tipe pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Ukuran Legislatif, Tipe Pemerintah.

Ketua,



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 196409031994032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

**THE EFFECT OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL CHARACTERISTICS ON
THE LEVEL OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT
DISCLOSURE**

(Study in Regencies and Cities in the SUMBAGSEL Region 2018-2022)

By:

Melita Utami

This research aims to empirically test the influence of regional government financial characteristics consisting of regional government age, regional government size, level of dependency, legislative size and type of government on the level of disclosure of regional government financial reports. This research focuses on district/city regional governments in the SUMBAGSEL region (Southern Sumatra) in 2018-2022. The type of data used in this research is secondary data in the form of local government financial reports. The population in this study are districts and cities in the SUMBAGSEL region in 2018-2022. The sampling method used in this research was a purposive sampling method and 27 districts/cities were obtained. The analysis technique used is multiple linear regression analysis with the SPSS version 25 analysis tool. The results of this research show that the size of local government, the level of dependency and the size of the legislature have a positive effect on the level of disclosure of local government financial reports. Meanwhile, the age of regional government and type of government have no effect on the level of disclosure of regional government financial reports.

Keywords: The Level of Disclosure of Regional Government Financial Reports, Age of Regional Government, Size of Regional Government, Level of Dependency, Legislative Size, Type of Government.

Chairman,



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196409031994032001

Acknowledge by,

Head of Accounting Departement



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA

NIP. 197303171997031002

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Melita Utami
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Indralaya/ 19 Januari 2003
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Dusun II, Muara Penimbung Iilir Kec.Indralaya, Kab.Ogan
ilir
Alamat Email : melitaazt19@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 25 Indralaya
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Indralaya
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Indralaya

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus BTA 70 Jakarta Tahun 2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Muda Divisi Seni dan Olahraga IMA FE UNSRI Kabinet Trisula Tahun 2021
2. Staff Muda Divisi Seni dan Olahraga IMA FE UNSRI Kabinet Arunika Tahun 2022

PENGALAMAN MAGANG

1. Magang Mandiri Bank Sumsel Babel cabang Indralaya tahun 2022

PRESTASI AKADEMIK

1. Ranking 2 Umum SMAN 1 Indralaya Jurusan IPS Tahun 2017-2020
2. Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTERGRITAS ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Agency Teory (Teori Keagenan).....	13
2.1.2 LKPD.....	14
2.1.3 Umur Pemerintah Daerah.....	18
2.1.4 Ukuran pemerintah Daerah	18
2.1.5 Tingkat Ketergantungan	20
2.1.6 Ukuran Legislatif	21
2.1.7 Tipe Pemerintah	21
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3 Alur Pikir	26
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	27
2.4.1 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.4.3 Pengaruh Tingkat ketergantungsnn terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.4.4 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat PengungkapanLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	29
2.4.5 Pengaruh Tipe Pemerintah terhadap Tingkat PengungkapanLaporan Keuangan Pemerintah Daerah	29
BAB III	31

METODE PENELITIAN	31
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel.....	31
Tabel 3.1 Data Sampel Penelitian	33
Tabel 3.2 Daftar Kabupaten / Kota Sampel Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Metode Analisis Data.....	36
3.5.1 Statistik Deskriptif	36
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.5.4 Pengujian Hipotesis	39
3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	40
3.6.1 Variabel Dependen.....	40
3.6.2 Variabel Independen	44
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Statistik Deskriptif.....	47
4.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	49
4.1.3 Uji Hipotesis	52
4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	56
4.2.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	57
4.2.3 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	58
4.2.4 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	59
4.2.5 Pengaruh Tipe Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	60
BAB V.....	61
KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Keterbatasan Penelitian	62
5.3 Saran	63
5.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya.....	63
5.3.2 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63
5.4 Implikasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Data Sampel Penelitian	33
Tabel 3. 2 Daftar Kabupaten / Kota Sampel Penelitian	34
Tabel 3. 3 item-item wajib yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No.71 Tahun 2010.	41
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	47
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinieritas	50
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	51
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi.....	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji F	52
Tabel 4. 7 Hasil Uji T	53
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir	26
-----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tingkat Pengungkapan LKPD (Y).....	69
Lampiran 2 Data Umur Pemerintah Daerah (X1)	72
Lampiran 3 Data Ukuran Pemerintah Daerah (X2).....	75
Lampiran 4 : Data Tingkat Ketergantungan (X3)	78
Lampiran 5 : Data Ukuran Legislatif (X4).....	81
Lampiran 6 : Data Tipe Pemerintah (X5).....	84
Lampiran 7 Statistik Deskriptif	85
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas	85
Lampiran 9 Hasil Uji Multikoleniaritas	86
Lampiran 10 Uji Heterokedastisitas	86
Lampiran 11 Uji Autokorelasi.....	86
Lampiran 12 Hasil Uji F.....	87
Lampiran 13 Hasil Uji T	87
Lampiran 14 Hasil Uji Koefisien Determinan	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah memerlukan periode pencatatan dan pelaporan yang mencakup berbagai tugas akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik yang menarik perhatian banyak pemangku kepentingan sejak terjadinya reformasi.

Keuangan daerah merupakan segala bentuk hak dan kewajiban suatu daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai melalui nominal uang dan segala bentuk kekayaan yang dapat menjadi kekayaan daerah yang melekat pada hak dan kewajiban daerah. Tak dapat dipungkiri jika suatu daerah tentunya harus membuat laporan keuangan yang disajikan melalui serangkaian proses akuntansi. Sejak reformasi akuntansi keuangan daerah menjadi pusat sorotan. Hal ini karena adanya regulasi baru pemerintah Indonesia yang telah merestorasi banyak hal salah satunya dalam mengelola keuangan daerah (Simbolon & Kurniawan, 2018).

Undang-undang telah mengatur tentang pengelolaan keuangan pemerintah hingga pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut untuk setiap tingkat pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, DPRD, dan juga masyarakat. Dengan dibuatnya undang-undang ini, diharapkan pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pasal 31 ayat (2)

Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah melalui tahap pengecekan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berupa laporan keuangan yang meliputi neraca, Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampirkan pada laporan keuangan pada masing-masing daerah.

Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai penyajian laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas yaitu dengan berpegang teguh pada prinsip ketepatan waktu dan persiapan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatur dua jenis pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu *mandatory disclosure* yang bermakna pemerintah diwajibkan untuk mengungkapkan informasi berdasarkan undang-undang yang berlaku dan *Voluntary disclosure* yang berarti tambahan informasi kepada pihak berelasi (*stakeholder*) yang bersifat terbuka dan diluar pengungkapan yang bersifat wajib (Budiarto & Indarti, 2019). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap SAP di Indonesia relatif rendah yaitu Berdasarkan data yang diberikan pada penelitian Lesmana (2010), dan Suhardjantoetal (2010) sebesar 22% dan 51,56%. Rendahnya angka diatas berarti bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belum menerapkan prinsip

transparansi. dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan baik. Sehingga demikian pengungkapan LKPD perlu menjadi perhatian khusus agar dalam implementasinya sesuai dengan prinsip dan hukum yang mengaturnya.

Sebagai langkah pemerintah untuk menjamin transparansi pengelolaan anggaran, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Dalam peraturan tersebut terdapat 2 dokumen terlampir berupa lampiran I yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan setelah 4 tahun sejak hukum tersebut diundangkan. Sementara itu, lampiran II mencakup standar akuntansi berbasis kas menuju akrual yang berlaku efektif hingga tahun 2014, dan berlaku untuk pemerintah daerah yang belum siap untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akuntansi akrual. Selaku penganjur Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dijelaskan pada Pasal 1 poin 15 dan 16 hingga 22 membahas tentang unsur-unsur pelaporan keuangan pemerintah yang wajib dipublikasikan. meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan SAL, neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas (LPE) serta CaLK.

Mengingat pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengungkapan laporan keuangan daerah tentunya transparansi dalam pengelolaan perlu ditingkatkan. Tak sedikit kebocoran anggaran yang

terjadi karena kelalaian pemerintah daerah sehingga mengakibatkan akan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang perlu menjadi sorotan agar pemerintah terus melakukan pembenahan sistem agar informasi mengenai laporan kinerja keuangan yang akan diungkapkan dan diterima oleh masyarakat bersifat lengkap dan terinci. Informasi yang disampaikan terdiri dari input data, proses hingga hasil dan keuntungan yang diperoleh dari semua program yang telah dijalankan pemerintah setiap tahunnya melalui LKPD sehingga dapat diukur tingkat efektivitasnya. Tetapi, sangat disayangkan karena belum ada sanksi yang akan diberikan jika tidak adanya pelaporan keuangan melalui internet yang menyebabkan pengungkapan ini cenderung bersifat pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* (Nosihana & Yaya, 2016).

Karakteristik yang memiliki kemungkinan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah umur pemerintah. Umur pemerintah daerah merupakan waktu atau lamanya sebuah pemerintah telah berdiri. Pemerintah daerah yang berumur lebih tua atau telah berdiri lebih dulu cenderung dianggap lebih berpengalaman dibanding dengan daerah tahun berdiri yang lebih baru. Hal tersebut bisa menjadi pengaruh dalam pengungkapan LKPD.

Selain umur pemerintahan, penulis memasukkan variabel lain, yaitu ukuran pemerintahan. Besar kecilnya suatu pemerintahan daerah dapat dinilai berdasarkan besar kecilnya aset yang dimilikinya. Aset bisa menjadi tolak ukur besar kecilnya pemerintahan, semakin besar aset maka semakin besar pula investasinya (Nosihana & Yaya, 2016). Biasanya jika suatu

pemerintahan daerah berukuran besar, hal ini menunjukkan bahwa jumlah asset atau kekayaan yang dimilikinya juga besar sehingga masyarakat akan lebih detail mengawasi program yang akan dilaksanakan pemerintah karena tentunya berkaitan dengan dana yang digelontorkan juga besar.

Karakteristik lain yang dapat berindikasi berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD ialah tingkat ketergantungan. Dana transfer merupakan bentuk pendanaan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat/provinsi tentunya akan meminta pengungkapan yang baik melalui laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan atas pertanggung jawaban dalam menggunakan dana yang telah diberikan karena semakin besar jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan menggambarkan seberapa tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Selain itu juga, besarnya Tingkat ketergantungan suatu pemerintah daerah memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan

Ukuran legislatif juga diindikasikan merupakan karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Legislatif merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang dalam hal membuat undang-undang dan melakukan pengawasan implementasi undang-undang. Salah satu bentuk anggota legislative adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD ialah lembaga di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah berkaitan dengan anggaran suatu daerah.

Tak hanya itu, DPRD juga memiliki fungsi dan tugas yaitu untuk mengawasi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan pertanggung jawaban yang baik dalam bentuk pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya jumlah ukuran legislatif atau anggota legislatif dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah akan mengungkapkan laporan keuangannya secara akurat.

Karakteristik lain berupa Tipe Pemerintah pun menjadi variabel dalam penelitian ini. Tipe pemerintah di Indonesia sendiri terbagi dalam 2 jenis meliputi daerah otonomi I untuk pemerintahan provinsi dan daerah otonomi II untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Pada daerah otonom II ini terdapat dua jenis pemerintah yang sama sejajar kedudukannya namun terlihat perbedaannya dari sisi kepadatan penduduk yang dimana pemerintah kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibanding wilayah kabupaten namun pemerintah kabupaten sering kali memiliki wilayah dan populasi yang lebih luas dibandingkan kota. Perbedaan inilah yang menjadikan penulis untuk melakukan penelitian agar mengetahui apakah dengan adanya dua jenis sifat pemerintah dengan tingkatan setara akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sebelumnya telah ada sejumlah riset yang mengkaji tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan namun fokus penelitian tersebut mengacu kepada unit akuntansi dan unit pelaporannya serta kekayaan daerah yang dimiliki. Peneliti tersebut ialah (Budiarto & Indarti, 2019), (Anggara & Cheisviyanny, 2020), dan (Hadi & Setiawan, 2020). 3 jenis penelitian tersebut lebih banyak menyoroti mengenai unit akuntansi atau pelaku yang

bertugas dalam akuntansi laporan keuangan bukan dari sisi karakteristiknya.

Pada penelitian (Andriani et al., 2019) memberikan hasil bahwa ukuran legislatif dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, Sementara itu, 5 karakteristik lainnya tidak memberikan pengaruh pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kelima karakteristik tersebut meliputi ukuran pemerintahan, tingkat ketergantungan, umur pemerintahan, PAD, diferensiasi fungsional dan belanja modal

Berbeda dengan penelitian diatas, kajian oleh (Naopal et al., 2017) (Naopal et al., 2017) menemukan bahwa umur pemerintahan dan opini audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi laporan keuangan daerah. Namun ukuran pemerintahan, hasil audit, dan jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan rentang tahun 2017-2022, penulis menemukan 6 penelitian dengan variabel yang sama tetapi hasilnya berbeda. Variabel yang digunakan pada keenam penelitian tersebut meliputi umur pemerintah yang dimana 3 penelitian memberikan hasil jika umur pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara 3 penelitian lainnya menunjukkan jika variabel umur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh atas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jumlah variabel penelitian yang meliputi umur pemerintah daerah,

ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan, Ukuran Legislatif dan Tipe pemerintah yang merupakan karakteristik pemerintah daerah. Adanya penambahan 2 variabel lain yaitu ukuran legislatif dan Tipe Pemerintah bertujuan untuk dilakukannya pengkajian lebih dalam terkait 2 variabel tersebut. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang variabel ukuran legislative mendorong peneliti untuk melakukan penelitian agar mengetahui hasil yang lebih akurat apakah ukuran legislatif akan memiliki pengaruh atau tidak terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada sisi lain, terkait penelitian yang mengkaji variabel tipe pemerintah masih sangat terbatas sehingga sangat diperlukan penelitian untuk menelaah apakah tipe pemerintah akan memberikan hasil berpengaruh atau tidak terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk populasi dan sampel yang diambil pada penelitian ini cenderung lebih luas yaitu pemerintah kabupaten dan kota di wilayah SUMBAGSEL (Sumatera Bagian Selatan). SUMBAGSEL merupakan sebuah wilayah yang luas yang dimana mencakup 5 provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, provinsi Jambi, provinsi Lampung, provinsi Bengkulu serta Kepulauan Bangka Belitung. Daerah yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Kabupaten yang ada pada kelima provinsi di wilayah SUMBAGSEL.

Alasan pemilihan wilayah SUMBAGSEL dikarenakan penulis ingin mengetahui pada setiap variabel apakah akan memiliki pengaruh atau tidak. Wilayah SUMBAGSEL yang cenderung memiliki anggaran yang besar dari sisi APBD dan total aset yang dimiliki lebih besar jika dibandingkan

dengan wilayah daerah lain menjadi pendorong dalam pemilihan objek penelitian karena dengan besarnya angka aset yang dimiliki suatu pemerintah daerah sangat perlu dilihat apakah pemerintah daerah tersebut telah melakukan pengungkapan laporan keuangan dengan baik atau malah sebaliknya yakni laporan keuangan yang diungkapkan tidak lengkap. Selain itu, munculnya beberapa kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh petinggi atau pemimpin daerah yang ternyata sumbernya adalah dari APBD dan aset daerah juga menjadi sorotan tentang bagaimana laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah sehingga permasalahan penyelewengan tersebut dapat terjadi. Aset daerah yang pada hakikatnya digunakan untuk kepentingan masyarakat malah disalah gunakan demi kepentingan pribadi, tentunya hal tersebut sangat perlu menjadi sorotan utamanya terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Adanya beberapa penelitian terdahulu yang memberikan hasil tidak ada pengaruh pada beberapa variabel salah satunya ukuran pemerintah membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut apakah dengan objek wilayah yang lebih besar yaitu dengan 5 provinsi di SUMBAGSEL akan memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu juga, sebuah penelitian memang perlu terus untuk dikembangkan salah satunya dengan pemilihan wilayah SUMBAGSEL sebagai objek penelitian agar dapat dapat diketahui hasil yang benar-benar tepat dan juga akurat. Walaupun berkiblat pada beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi sumber referensi namun dalam hal penulisan dan penyusunan peneliti menggunakan bahasa dan kalimat sendiri untuk menghindari terjadinya plagiarisme terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan fenomena di atas serta tentunya ada perbedaan hasil pada setiap penelitian terdahulu dengan itu penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan meneliti secara empiris dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten dan Kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh tipe Pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022.
5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tipe Pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Wilayah SUMBAGSEL Tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian

dimasa mendatang terkhusus pada tataran akuntansi sektor publik dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat memberikan kontribusi pada bidang penelitian akuntansi sektor publik

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sejumlah kegunaan bagi penulis yaitu dengan menambah wawasan dan ilmu yang lebih luas mengenai pemahaman terhadap LKPD yang dibandingkan dari berbagai sudut pandang variabel.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak (*stakeholder*) pemerintah mengenai tingkat pengungkapan LKPD dengan benadana mampu menghindarkan dari indikasi kecurangan dan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan efektif.

3. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat dalam hal pengungkapan LKPD yakni Masyarakat dapat memperoleh informasi secara detail dan dapat memahami informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik tentang pengaruh karakteristik keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016.” *Akuntansi Dan Manajemen*, 14, 1–14.
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Urnal Eksplorasi Akuntansi*, 2, 2162–2184
- Aulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 04, 1–11.
- Bowrey, G. (2007). Bowrey, G. (2007). Have recent financial reforms improved financial accountability in the Australian Commonwealth public sector? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 1(3), 4–15.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12, 19–31.
- Ghozali, I. (2017). *Model Persamaan Struktural Konsep Dan Aplikasi Program*. (AMOS 24). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, D. A., & Setiawan, M. A. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budgeting Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2, 2099–2114.
- Inata, L. C., Saraswati, E., & Ghofar, A. (2022). Financial Statement Disclosure On Indonesia Local Government : IPSAS And PSAP Disclosure Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 611–625.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karlina, Lindrianasari, & Gamayuni, R. . (2018). Determinant Analisis of Audit Report Lag in Regional Governrnments in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(4), 105–110.
- Kogoya, S., Salle, A., & Wijaya, H. C. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan LKPD Di Pemerintah Kabupaten-Kota Di Provinsi Papua. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14, 98–111.
- Kurniawati, D., Sarwono, A. E., & Sunarti. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informas*, 16, 237–248.
- Lesmana, S. I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

- Naopal, F., Rahayu, S., & Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *7*, 56–68.
- Nicolo, G., Znellato, G., Manes-Rossi, F., & Tiron-Tudor, A. (2021). Corporate reporting metamorphosis: empirical findings from state-owned enterprises. *Public Money and Management. Public Money and Management*, *41*(2), 138–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1719633>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. *3*(2), 87–110.
- Patrick, P. A. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. *Pennsylvania State University*.
- Prasasti, A. M., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *9*(2), 94–103.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). *Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opni Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. 97–110.
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2015-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1111–1130.
- Rahim, Mustika, W., & Martani, D. (2012). . Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Universitas Indonesia: Jakarta*.
- Rahman, A. (2022). *Do Government Characteristics Affect E-Government Maturity? Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *12*, 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.20543>
- Rianti, F., Tullah, D. S., & Apriyanti, E. (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Audit Delay. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Rosinta. (2018). Pengaruh NPM, DER, DPR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen, STIE Indonesia*.
- Setyowati, L. (2016). *Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *6*(1), 45–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia*. *30*, 54–70.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Suwardjono. (2017). *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan* (3rd ed.). BPF.

Widarjono, A. (2019). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (3rd ed.). Ekonesia.